

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab V maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perubahan APBD murni dan APBD perubahan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Kupang Tahun Anggaran 2015 disebabkan oleh faktor-faktor : Rasionalisasi Anggaran pada Dinas Pekerjaan umum Kota Kupang Tahun Anggaran 2015, banyak program dan kegiatan yang tidak di anggarkan dalam APBD murni Dinas Pekerjaan Umum Kota Kupang Tahun Anggaran 2015 dan kebijakan strategis Pemerintah Pusat yang mempengaruhi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Kupang.
2. Proses perubahan anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Kupang sudah sesuai dengan Permendagri No.13 Tahun 2006 dapa dilihat pada aspek kesesuaian pasal 154 dasar perubahan APBD.

6.2 Saran

Untuk merajuk pada faktor-faktor lapangan dan hasil temuan pada penelitian ini, maka dalam rangka analisis perubahan APBD pada Dinas Pekerjaan Umum, disarankan beberapa hal :

1. Pemerintah Kota Kupang dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Kota Kupang harus memperhatikan perbedaan Anggaran.

2. Pemerintah Kota dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Kota Kupang terkait dengan perubahan anggaran dapat mempertimbangkan peraturan dalam perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra.2006 . *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*, Erlangga, Jakarta.
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Dan Pengendalian Keuangan Daerah*. UUP AMP YKPN Balaksaumur.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta.
- Mamesah, D.J., *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Andi Yogyakarta
- Mardiasmo,2005, *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Nordiawan . 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit, Salemba Empat, Jakarta.
- _____, Undang-undang Nomor : 25 Tahun 1999 Tentang *Pemerintahan Daerah*
- _____, Undang-undang Nomor : 25 Tahun 1999 Tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- _____, Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintahan Daerah*
- _____, Undang-undang Nomor : 33 Tahun 2004 Tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*
- _____, Peraturan Menteri dalam Negeri No. 13 Tahun 2006. Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- _____, UU No. 17 Tahun 2003. *Tentang Keuangan Negara*
- _____, Peraturan Daerah Kota Kupang No 18 Tahun 2011. Tentang *Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah*.

_____, Peraturan dalam Negeri No. 26 Tahun 2006. Tentang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2007

_____, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005. Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah

_____, Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2007. Tentang *Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah*, Penerbit, Fokus Media, Bandung.